

Pengaruh Penerapan Prinsip Manajemen terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Permadi Hasan¹, Hania², Andi Astinah Adnan³, Akhyaruddin Hakim⁴

*1,2,3,4*Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng, Sulawesi Selatan, Indonesia
permadi.hasan@yahoo.co.id, hajihania25@gmail.com,
andi.astinah.adnan@gmail.com

Abstrak Kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang banyak disoroti oleh Masyarakat karena kinerja dalam penyusunan APBD belum optimal dan diindikasikan adanya program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan capaian kinerja program pada sebagian SKPD masih belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja, dan pengaruh implementasi anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja, Untuk mengetahui pengaruh pelaporan / pertanggungjawaban anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja, serta Untuk menentukan pengaruhnya terhadap implementasi anggaran atas Pertanggungjawaban Kinerja , dan menentukan efeknya bersama-sama perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja dapat secara bersama-sama memengaruhi akuntabilitas kinerja. Teknik pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yang menganalisis penjelasan. Penelitian tentang Pengujian Statistik operasi menunjukkan nilai regresi parsial signifikansi Perencanaan Anggaran (X1) 0,000 (3,026 > 1,676). Implementasi / Eksekusi Anggaran (X2) 0,002 (2,457 > 1,676). Pelaporan / Tanggung Jawab Anggaran (X3) 0,001 (3,122 > 1,676). Evaluasi Kinerja (X4) 0,000 (2,203 > 1,676). Ini menunjukkan semua variabel penyanyi berpengaruh Terhadap Kinerja Akuntabilitas (Y).

Kata Kunci — Manajemen dan Akuntabilitas

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan

dan terbuka kepada publik dan akuntabel (bertanggung jawab) sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap Simkeu, kedua undang – undang tersebut merubah pertanggungjawaban pemerintah

daerah dari pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi pertanggungjawaban dengan memperhatikan beberapa hal, seperti pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan anggaran.

Anggaran menjadi hal yang sangat setimpal dan penting di lingkungan pemerintahan karena dampaknya terhadap pertanggungjawaban pemerintah, sehubungan dengan hal fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal akuntabilitas dari akuntabel vertikal ke akuntabel horizontal menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran yang ada. pertanggungjawaban melalui anggaran termasuk penyusunan sampai dengan pelaporan anggaran. Penetapan anggaran yang berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disampaikan tentang penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan Adanya hal ini

dapat dikatakan bahwa terpenuhi pula kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya hasil yang memuaskan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi ekonomi, efisien, serta efektif.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan sistem penganggaran yang berfokus pada hasil organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Anggaran dengan pendekatan ini mengharapkan pada konsep hasil untuk uang dan pengawasan atas kinerja *output*. anggaran tradisional, tidak terlalu optimal sehingga hal ini yang mendasari Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi kelemahan yang terdapat didalam sistem tersebut. Anggaran nasional memiliki kelemahan yaitu tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002:84). Anggaran yang tidak efektif dan tidak memiliki tolok ukur serta tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menyebabkan perencanaan yang telah rumuskan tidak tepat sasaran. Pengukuran kinerja secara *continue* akan memberikan *feed back*, sehingga upaya perbaikan secara berkelanjutan akan mencapai

keberhasilan di masa depan (Bastian, 2006: 275).

Penyusunan dan perumusan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditemukan oleh Pemda sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja ini diharapkan anggaran dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban manajemen sektor publik. Anggaran berbasis kinerja mengkhuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*. Penyusunan Rancangan APBD di Pemerintah Kabupaten Enrekang dimulai dengan penyusunan KUA dan PPAS dan dituangkan dalam nota kesepakatan PPA antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah membuat Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja pemerintahan daerah atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun

bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang, berdasarkan data keuangan Kabupaten Enrekang terkait PAD yang diperoleh, belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada Tabel

Tabel 1. Data Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan (PAD) Kabupaten Enrekang Tahun 20

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
55.854.486.754,00	50.355.757.354,44

Sumber : DPKAD Kabupaten Enrekang, 2016.

Tabel I memperlihatkan jumlah PAD dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran terdapat ketidaktercapaian. Hal ini menunjukkan kinerja dalam penyusunan APBD belum optimal

dan diindikasikan adanya program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari capaian pengukuran pencapaian kinerja program kegiatan yang dituangkan dalam LAKIP Kabupaten Enrekang Tahun 2015 pada Tabel:

Tabel 2. Data Pengukuran Capaian Sasaran dan Kinerja Kegiatan Kabupaten Enrekang Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target	SKPD
Tingkat akses air minum masyarakat yang aman dengan sistem JP dan BJP Terlindungi (SPM)	4,99	2,847	57,05 %	DPU
Presentase kecukupan anggaran pelayanan kesehatan gratis dan JKN yang dibayarkan sesuai jumlah klaim	85	75	88,23%	RSU

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (SPM)	97	34	35,05 %	Diskes
Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RSUD	85	82,87	97,50 %	Diskes
Prosentase siswa miskin yang mendapatkan Dana Bantuan Siswa Miskin	100	80	80,00 %	Disdikbud
Prosentase rata-rata usulan prioritas hasil Musrenbang desa/Kel yang terakomodir dalam APBD	45	36	80,00 %	Bappeda
Volume transaksi komoditi di Sub Terminal Agribisnis	1,34	1,111	82,94 %	Distabun
Rasio ternak yang mendapat pelayanan kesehatan ternak	20,122	15,091	75,00 %	Disnakin

Jumlah Ternak yang di Inseminasi Buatan	3,987	2,544	63,81 %	Disnakin
---	-------	-------	---------	----------

Sumber : DPKAD Kabupaten Enrekang, 2016.

Tabel 2 memperlihatkan LAKIP Kabupaten Enrekang Tahun 2015 yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja program pada sebagian SKPD masih belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penganggaran berbasis kinerja sangat erat hubungannya dengan penerapan prinsip manajemen yakni, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan /akuntabilitas, dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan transparan kepada masyarakat agar keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya penerapan prinsip manajemen pada anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, karena semakin baik perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja maka akuntabilitas kinerja yang

dilakukan pemerintah semakin efektif. Menurut Nafarin (2004:20) yang menyatakan bahwa bila dibandingkan antara kegunaan anggaran dengan fungsi-fungsi manajemen, maka anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan perencanaan (*planning*), pengkoordinasian dan pengendalian (*controlling*). Sementara menurut Fayol (1992:21) yakni seorang industrialis Prancis, yang menyatakan bahwa keberhasilannya mengelola sebuah perusahaan berkat sistem manajemennya. Henri Fayol menerapkan pentingnya kecermatan dalam mempraktikan prinsip manajemen yakni: Merancang, Mengorganisasi (Pelaksanaan), Pengarahan (Pengawasan/Pelaporan) dan Evaluasi. Prinsip manajemen yaitu elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan. Kemudian *Local Area Network* (2008) menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja yang

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat Akuntabilitas secara periodik. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui 4 (empat) tahapan proses yaitu: 1) Perencanaan Anggaran; 2) Pelaksanaan Anggaran; 3) Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran; 4) Evaluasi Kinerja. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan anggaran dilakukan oleh Haspiarti (2012). Penelitian tersebut membuktikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban kinerja pada instansi pemerintah Kota Pare-Pare.

Melihat berbagai permasalahan yang diuraikan diatas, dan beberapa rujukan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti

berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip Manajemen Pada Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”, dengan menggunakan empat variabel yaitu: perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), dan evaluasi kinerja (X4) dengan tujuan Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang, Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang, Untuk mengetahui pengaruh pelaporan pertanggungjawaban anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang, Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Berikutnya, Wijayanti (2008:1) manajemen adalah

proses *Planning*, pengorganisasian, *Actuating*, dan *Evaluation* usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan SDM organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Subagyo, (2000:4) manajemen adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang rasional yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan dengan mengkomunikasikan kegiatan orang lain fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan manajemen yang meliputi *Planning*, *staffing*, mengomunikasikan pengarahannya dan pengawasan. Kemudian pengertian manajemen menurut Fondt et al (2004:5) dalam bukunya "*management: challenges For tomorrow's Leaders*", yaitu : "manajemen adalah proses administrasi and coordinating resources efektif dan efisien in an effort to achieve the goals of organization " Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengatur sumber daya-sumber daya yang dimilikinya agar dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menurut Hasibuan (2001:38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian dan Pengendalian. Menurut Nafarin (2004:20) yang menyatakan bahwa bila

dibandingkan antara kegunaan anggaran dengan fungsi-fungsi manajemen, maka anggaran mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dengan manajemen, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan (*planning*), pengkoordinasian dan pengendalian (*controlling*). Menurut Fayol (1992:21) yakni seorang industrialis Prancis, yang menyatakan bahwa keberhasilannya mengelola sebuah perusahaan berkat sistem manajemennya. Henri Fayol menerapkan pentingnya kecermatan dalam mempraktikkan prinsip manajemen yakni: Merancang, Mengorganisasi (Pelaksanaan), Pengarahan (Pengawasan/Pelaporan) dan Evaluasi. Prinsip manajemen yaitu elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Teori manajemen menyatakan bahwa manajemen memiliki beberapa fungsi. Fungsi dalam hal ini adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan administratif (Herujito, 2001:13). Untuk mencapai tujuannya organisasi memerlukan dukungan manajemen dengan fungsinya sesuai kebutuhan. Kegiatan

fungsi-fungsi manajemen diperjelas secara ringkas, yaitu (Amsyah, 2005:30):

- 1) Perencanaan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan tujuan dan menguraikannya dalam bentuk perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut,
- 2) Pengorganisasian adalah yang berkaitan dengan pengelompokan personel dan fungsinya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan misinya,
- 3) Pengaturan personel (*staffing*) adalah yang berkaitan dengan bimbingan dan pengaturan kerja personel. bagian masing-masing manajemen sampai pada kegiatan, seperti seleksi, penempatan, *practice*, pengembangan dan kompensasi, sebagai bagian dari bantuan bagian pada badan personalia organisasi SDM,
- 4) Pengarahan (*directing*) adalah yang berkaitan dengan kegiatan melakukan pengarahan-pengarahan, tugas-tugas, dan kerangka,
- 5) Pengawasan (*controlling*) kegiatan yang terkait dengan evaluasi untuk menentukan apakah implementasinya sudah dikerjakan sesuai dengan Planning, sejauh mana kemajuan yang dicapai, dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan, serta

melakukan perbaikan bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan.

Berikutnya, Rudianto (2009:3) anggaran adalah raker organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk formal, kuantitatif, dan sistematis. Bastian (2006:151) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Berdasarkan pernyataan tersebut, anggaran dapat diartikan sebagai raker yang dilakukan oleh organisasi dalam menempatkan sumber daya yang dimilikinya di masa depan dan dinyatakan dalam bentuk *financial*. Menurut Nordiawan (2006:48), anggaran adalah pernyataan tentang rincian kinerja yang menjadi acuan dan akan dicapai selama periode yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam ukuran material. Anggaran adalah rencana yang terkait pendapatan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Anggaran merupakan sebagai suatu bentuk standar kinerja yang ditargetkan, yang mencakup rencana-rencana manajemen dalam suatu organisasi, menempatkan sumber daya dan kerjasama aktivitas. Secara umum anggaran dimaksud menggambarkan tentang rencana

manajemen secara komprehensif untuk masa yang akan datang dan bagaimana rencana tersebut dapat dicapai dengan baik (Garrison dan Norren, 2000:402).

Semua hal yang telah disusun diatas tentunya tidak boleh melenceng atau tidak sesuai dengan fungsi anggaran yang sebenarnya. Menurut Mulyadi (2001:502) fungsi anggaran yaitu:

1. anggaran merupakan perencanaan proses penyusunan raker,
2. anggaran merupakan fokus kegiatan yang akan dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan perusahaan di masa depan,
3. anggaran berfungsi sebagai penghubung disetiap bidang organisasi dalam perusahaan yang mengaitkan atasan bawah dengan atasan ditingkat atas, anggaran berfungsi sebagai acuan yang dipakai dalam pembanding hasil operasi sesungguhnya,
4. anggaran berfungsi sebagai alat pengontrol yang dapat digunakan oleh manajemen menunjuk bidang yang kuat dan yang lemah bagi organisasi,
5. anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memberikan semangat kepada atasan dan karyawan atau staf agar selalu bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang

mengarah pada hasil. Menurut Halim (2007:177) *performance base budgeting* merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk menghubungkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan output dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari output tersebut. output dan hasil tersebut ditetapkan dalam target kinerja pada setiap badan kinerja. Bastian (2006:171) Penganggaran berbasis kinerja pada hakekatnya adalah sebuah sistem penganggaran yang tujuannya pada output organisasi yang mana keterkaitannya dengan visi, misi, dan renstra sebuah organisasi. Program pada anggaran berbasis kinerja diartikan sebagai alat yang digunakan dalam kebijakan yang berisi lebih dari satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta mendapatkan tepat anggaran atau kegiatan masyarakat yang diarahakan oleh instansi pemerintah.

Pendekatan anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menangani berbagai macam kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional, termasuk kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik dalam

pemerintahan. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep nilai keuangan dan pengawasan atas kinerja keluaran. (Mardiasmo, 2002:84) Pendekatan ini menekankan metode penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistimatis dan rasional dalam proses perumusan kebijakan keputusan. (Mardiasmo, 2002:90) penganggaran berbasis kinerja menggunakan prinsip-prinsip :

- 1) Alokasi Anggaran ditujukan pada Kinerja (*output and outcome oriented*). Penentuan anggaran yang disusun dalam dokumen raker dan anggaran dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan output yang telah ditetapkan dalam rencana.
- 2) keseimbangan pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip pertanggungjawaban (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menunjukkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai output sesuai rencana. Kebebasan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai output dan hasilnya pada saat pelaksanaan

kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tingkatan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan aktivitas. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

- 3) *Money Follow Function, Function Followed by Structure. Money follow function* merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa penempatan anggaran untuk membiayai suatu kegiatan didasarkan pada tupoksi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dicantumkan dalam peraturan perundangan yang berlaku).

Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip fungsi struktur, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang dipertanggungjawabkan. Tupoksi suatu organisasi dibagi habis dalam bagian kerja yang ada dalam struktur organisasi yang dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi plagiasi tugas-fungsi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas maka

tujuan penerapan penganggaran berbasis kinerja diharapkan:

- 1) Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai
- 2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*);
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pertanggungjawaban badan dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan Anggaran. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku demi tercapainya suatu tujuan bernegara dan menghindari dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi penyelenggaraan *big planning* atau *planning* yang tingkatannya berada pada

kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah NKRI diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan disusunnya Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan Anggaran. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah (SEKDA). Dalam proses penganggaran selalu melibatkan lebih dari satu orang dalam persiapannya dan memperhatikan feed back dari pengalaman yang sebenarnya. Maka dari itu, dalam menjalankan anggaran yang harus dilakukan adalah: (a) memastikan bahwa anggaran akan dijalankan sesuai dengan fungsi yang diberikan baik dalam aspek keuangan hingga pengambilan keputusan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan pembelanjaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran

- serta memberikan pemerataan bagi para manajer.
3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan secara periodik yang mencakup: a. Laporan realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b. Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). c. Catatan atas laporan keuangan SKPD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merumuskan dan membuat laporan atas arus kas secara berkala kepada kepala daerah, laporan tersebut disampaikan sesuai dengan aturan dan SOP yang dibuat dan ditentukan oleh pemerintah.
 4. Evaluasi Kinerja. evaluation kinerja adalah suatu aktivitas untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan organisasi atau bagian kerja dalam menjalankan tupoksi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi

tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian eksplanasi, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan prinsip manajemen pada anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten enrekang. melihat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak maka penentuan sampel dalam penelitian ini adalah mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel atau biasa disebut sebagai sampel jenuh. hal ini sesuai dengan pendapat sugiyono (2007) yang menyatakan bahwa jika jumlah sampel kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, tetapi jika jumlah sampel lebih dari 100 maka lebih baik diambil antara 10-15 persen dari jumlah populasi ataupun tergantung dari kemampuan peneliti. adapun sampel yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 45 orang. adapun tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuisisioner, dan studi kepustakaan, sedangkan tehnik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda, analisis koefisiensi determinasi, pengujian hipotesis.

III. PEMBAHASAN

Pengaruh penerapan prinsip manajemen anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah kabupaten enrekang sebagai berikut;

A. Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Perencanaan Anggaran (X1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Perencanaan Anggaran (X1) sebesar 0.000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.130 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel ($3.026 > 1.676$). Hal ini menunjukkan bahwa jika Perencanaan Anggaran pada Anggaran Berbasis Kinerja diterapkan dengan baik di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 13,0%, demikian pun sebaliknya.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika perencanaan anggaran yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja

instansi di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

B. Pengaruh Implementasi Anggaran (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y).

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Implementasi/Pelaksanaan Anggaran (X2) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Implementasi/Pelaksanaan Anggaran (X2) sebesar 0,002 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.259 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel ($2.457 > 1.676$). Hal ini menunjukkan bahwa jika kinerja Pelaksanaan Anggaran diterapkan dengan baik di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 25,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika implementasi anggaran dalam hal a) Anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan; b) Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD;c) Prosedur APBD sesuai

dengan besaran yang tertera dalam dokumen DPA dan Anggaran arus Kas. Dilakukan dengan baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

C. Pengaruh Pelaporan Pertanggung jawaban Anggaran (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y).

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3) sebesar 0,001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.372 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel ($3.122 > 1.676$). Hal ini menunjukkan bahwa jika kinerja Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran diterapkan dengan baik di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 37,2%. Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, pada akhir suatu periode capaian kinerja telah melaporkan kepada pihak

yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan dalam hal ini mencakup a) Laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas; b) Laporan keuangan sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan; c) Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk melaporkan sesuai dengan keadaan real penggunaan dan pengontrolan sumber daya serta pengimplementasian kebijakan yang dibebankan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Mardiasmo (2002:20) mengartikan bahwa keharusan bagi pemegang kepercayaan (*agent*) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, menyiapkan, melaporkan dan meluapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi *responsibility* kepada pihak manajer (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta laporan tersebut. Sementara Menurut Simbolon (2006:1) menyatakan kewajiban untuk

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

D. Pengaruh Evaluasi Kinerja (X4) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa Evaluasi Kinerja (X4) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Evaluasi Kinerja (X4) sebesar 0,000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.391 dan perbandingan nilai T hitung dan T tabel ($2.203 > 1.676$). Hal ini menunjukkan bahwa jika kinerja Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan dengan baik di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 39,1%. Evaluasi kinerja di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan melakukan evaluasi sehingga bisa

mengetahui apabila terjadi penyalahgunaan atau kendala dalam pelaksanaan anggaran, maka manajer bisa memutuskan dan mengambil langkah untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut.

E. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan pertanggung jawaban Anggaran dan Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa variabel perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), dan evaluasi kinerja (X4). memperoleh nilai F hitung $12.050 > F_{tabel} 2,56$, yang berarti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja di Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kab. Enrekang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan prinsip manajemen dalam hal ini perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja pada anggaran berbasis

kinerja diterapkan dengan baik, maka semakin besar pula peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. Pentingnya kecermatan dalam mempraktikkan prinsip manajemen yakni: Merancang, Mengorganisasi (Pelaksanaan), Pengarahan (Pengawasan/Pelaporan) dan Evaluasi. Prinsip manajemen akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian LAN (2008) menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi suatu organisasi dalam menggapai tujuan dan sasaran yang ditentukan melalui alat *responsibility* secara berkala. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui 4 (empat) tahapan proses yaitu: 1) Perencanaan Anggaran; 2) Pelaksanaan Anggaran; 3)

Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran; 4) Evaluasi Kinerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Implementasi/Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Evaluasi Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja di Dinas Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pelaporan pertanggung jawaban anggaran dan Evaluasi kinerja akan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Edisi 11, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Buku 2, Jakarta.
- [2] Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : Garamedia. Pustaka Utama.
- [3] Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- [4] DEPUTI IV BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: BPKP.
- [5] DPKAD Kabupaten Enrekang. 2016. Capaian Kinerja Keuangan (PAD) Kabupaten Enrekang Tahun 2015.
- [6] ----- . 2016. Capaian Sasaran dan Kinerja Kegiatan Kabupaten Enrekang Tahun 2015.
- [7] Ernie dan Saefullah. 2006. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- [8] Fayol, H. 1992. *Fungsi Administrasi*. Rineka. Jakarta.
- [9] Garrison dan Noreen, 2000. *Akuntansi Manajerial*, Salemba Empat, Jakarta
- [10] Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, (Online), Volume 13 No. 2, (diakses 27 September 2012).
- [11] Harjanti, Heti Purwita. (2009). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok. Tesis. UNPAD. Jawa Barat.

- [12] Halim. 2012. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [13] Herujito. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: P.T. Grasindo
- [14] Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- [15] Harahap, Sofyan Safri, 2001, *Budgeting, Penganggaran Perencanaan Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [16] Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- [17] Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- [18] Kurniawan. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Skripsi. UPI. Jakarta.
- [19] Koontz, Harold. 1990. *Manajemen*. 2005. PT Elexmedia Komputindo, Jakarta
- [20] Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit STIE.
- [21] Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1.